



KR-Driyanto
Ketua DPC PDIP, Sekretaris dan Ketua BBHAR saat memberikan keterangan pers.

Langgar Netralitas dalam Pilkada Bisa Dipidana

BANYUMAS (KR) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII/2024 membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota TNI/Polri dan pejabat daerah yang melanggar netralitas dalam Pilkada dapat dikenakan sanksi pidana. Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Banyumas mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Banyumas Obi Suharjono, Selasa (19/11) mengajak warga untuk aktif mengawasi netralitas aparaturnegara selama proses Pilkada Serentak 2024. Menurut Obi, keberanian masyarakat sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil. "Kalau menemukan pelanggaran, segera rekam, viral-kan, dan laporkan. Jangan takut, karena aturan hukum kini semakin jelas dan berpihak pada demokrasi yang sehat," kata Obi saat berbicara kepada awak media.

Obi mengungkapkan bahwa selama ini banyak warga enggan melaporkan pelanggaran karena adanya intimidasi, terutama di tingkat akar rumput. Namun, ia menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelanggar kini cukup tegas, yakni penjara 1 hingga 6 bulan dan denda Rp 600.000 hingga Rp 6 juta. Sekretaris DPC PDIP Banyumas, Arie Suprpto, berharap putusan MK ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. "Semua pihak, termasuk masyarakat, harus aktif dalam menjaga netralitas. Jangan ragu untuk melapor, baik langsung ke pihak berwajib maupun melalui kami. Kami menyediakan tim bantuan hukum untuk mendukung laporan masyarakat," ujar Arie. **(Dri)-f**

Pelantikan Perades Pati Minta Ditunda

PATI (KR) - Lembaga Joeang mendesak Penjabat (Pj) Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko agar mengingatkan para kepala desa supaya menunda pelantikan perangkat desa 2024. "Hal ini karena proses pengisian perades terjadi kesalahan dasar hukum," kata Direktur Joeang, Fatkurochman SH MH, Minggu (17/11).

Menurut Fatkurochman, pihaknya sudah mengirim surat kepada Pj bupati Pati. Kalau tidak ada perhatian, lembaga Joeang akan mengajukan gugatan ke PTUN. Isi surat tersebut ada empat tuntutan, yakni minta penundaan proses segala tahapan pengisian perangkat deesa tahun 2024, minta jajaran Staf Pemkab Pati untuk mengkaji regulasi dan peraturan yang mengatur tentang pengisian perangkat desa agar sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang Undang Tentang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

"Selain itu, kami juga minta Pj Bupati Pati menunda rekomendasi izin pelantikan oleh Kepala Desa yang telah melakukan pengisian Perades tahun 2024 yang telah dinyatakan lulus tes ujian dan diusulkan untuk dilantik menjadi perades sesuai jabatan," kata Fatkurochman.

Namun yang lebih penting, Pj Bupati Pati diminta agar membatalkan Surat Nomor 141.4/2661.4 tentang Izin Pengisian Perangkat Desa Tahun 2024 di Kabupaten Pati. Sebab, Perbup tersebut dinilai bertentangan dengan Undang Undang di atasnya. "Sebenarnya kami juga sudah pernah berkirim surat berisi karut marut pengisian perangkat desa 2024. Namun tak kunjung ada jawaban. Kalau tetap tidak ada jawaban dari Pj bupati, kami akan mengajukan gugatan ke PTUN," tandas Faturochman. **(Cuk)-f**

Desa Diminta Percepat Pelaporan Bencana Alam

SUKOHARJO (KR) Pemerintah desa dan kelurahan diminta mempercepat sistem pelaporan bencana alam di wilayah masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut penanganan kepada warga terdampak. Tim gabungan yang disiagakan diharapkan bisa langsung bergerak ke lokasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo, Selasa (19/11) mengatakan, kesiapsiagaan bencana alam dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penanganan saat kejadian dan pasca bencana alam. Namun juga, menyangkut percepatan pelaporan kejadian dari desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten.

Percepatan pelaporan kejadian bencana alam dari desa dan kelurahan sangat diharapkan BPBD Sukoharjo. Hal ini berkaitan dengan kecepatan pendataan dan penanganan pasca kejadian bencana alam. "BPBD Sukoharjo meminta kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan percepatan laporan kejadian bencana alam. Pasca kejadian perlu dilakukan pendataan dan penanganan kepada warga terdampak bencana alam," ujarnya.

BPBD Sukoharjo sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan terkait pelaporan kejadian bencana alam. Termasuk pendataan dalam hal persiapan penanganan kepada warga terdampak bencana alam. "Sudah masuk peralihan musim dan rawan bencana alam. Sistem pendataan dan laporan dari bawah ke atas diminta dipercepat," lanjutnya. Ariyanto Mulyatmojo, mengatakan, curah hujan tinggi terjadi hampir merata disekeliling wilayah di Sukoharjo. Hujan turun dengan durasi waktu lama disertai dengan angin kencang. Kejadian tersebut tidak sampai berdampak pada kerusakan parah. **(Mam)-f**

CILACAP RAIH PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN RI

Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

CILACAP (KR)

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menerima penghargaan bergengsi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024 yang dilakukan Ombudsman RI. Pemkab Cilacap dianugerahi predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 98,54, yang memantapkan posisi di antara 10 besar kabupaten terbaik di Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran Indonesia, Yusril Ihza Mahendra kepada Pj Bupati Cilacap M Arief Irwanto di Jakarta, Kamis (14/11) pekan lalu.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, mengatakan, tugas utama Ombudsman RI itu menangani laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik dan mencegah terjadinya maladministrasi.

Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui survei kepatuhan untuk menilai pemenuhan



standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024, penilaian tersebut melibatkan 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah ka-

bupaten.

Penganugerahan hasil penilaian itu merupakan bentuk apresiasi Ombudsman RI kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Adapun tujuan dari penganugerahan tersebut untuk memberikan informasi mengenai hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang mencapai tingkat kepatuhan tinggi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan untuk mencegah maladministrasi.

Sedang indikator dan variabel penilaian tahun ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan hasil akhir penilaian mencakup pelaksanaan produk pengawasan Ombuds-



KR-Istimewa
Pj Bupati Cilacap M Arief Irwanto tunjukkan penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024.

man seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA), dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan.

Pj. Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, menyatakan penghargaan dari Ombudsman RI sangat

bergengsi dan menjadi pemicu bagi Pemkab Cilacap untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan.

"Penghargaan ini akan memacu kami untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik lagi," ungkap Arief. **(Mak)-f**

Logistik Pilkada 2024 Siap Didistribusikan

SUKOHARJO (KR) - Persiapan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sukoharjo terus dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pekan ini, logistik siap didistribusikan ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, Selasa (19/11) mengatakan, bahwa seluruh logistik telah ditata dan disusun dengan rapi sesuai jumlah dan jenisnya di masing-masing kotak suara. Namun, hingga kini, kotak suara tersebut belum disegel, menunggu proses pengecekan terakhir untuk memastikan kelengkapannya.

"Kami telah memasukkan seluruh logistik ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Penyegekan belum dilakukan karena kami ingin memastikan seluruh isi kotak suara lengkap dan sesuai," ujarnya.

Syakbani juga menyebutkan adanya kekurangan pengiriman surat suara sebanyak 1.208 lembar. Surat suara tersebut telah di-

ambil langsung dari penyedia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (16/11). "Kekurangan surat suara sudah kami tindak lanjut dan ambil langsung dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Saat ini semuanya sudah lengkap," lanjutnya.

Proses pengecekan final, pengegelan sampul surat suara, dan pengemasan akan dilakukan mulai Rabu (20/11/2024). Setelah itu, kotak suara akan disegel dan didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk kemudian diteruskan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami targetkan pekan ini,

seluruh kotak suara sudah disegel. Distribusi ke TPS harus selesai paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara," lanjutnya.

KPU Sukoharjo memastikan distribusi logistik ini berjalan sesuai jadwal untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan koordinasi yang matang bersama jajaran terkait, KPU berharap proses ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Rencana mulai Jumat (22/11) dimulai dari kecamatan terjauh dari gudang yaitu Weru, Bulu Tawang Sari Nguter Bendosari.

(Mam)-f

Polres Purbalingga Siap Siaga

PURBALINGGA (KR) - Hari pemungutan suara pemilihan bupati (Pilbup) Purbalingga yang semakin dekat diikuti perkembangan situasi kamtibmas yang dinamis. Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto memerintahkan seluruh anggotanya untuk meningkatkan kesiagaan guna mengantisipasi perkembangan situasi tersebut.

"Seluruh personel Polres Purbalingga harus dalam kondisi siap siaga. Termasuk personel

yang bertugas ununiform juga harus siap bila sewaktu-waktu diperlukan menggunakan seragam dinas beserta kelengkapan-nya," tegas Kapolres AKBP Rosyid Hartanto saat memimpin apel Selasa (19/11) pagi.

Menurut Kapolres, dalam pengamanan kegiatan kampanye, sejumlah personel sudah diterjunkan. Dalam sehari bisa mencapai 30 hingga 60 lokasi kegiatan. Apabila sebagian personel sudah ditugaskan dalam

pengamanan kampanye, maka personel lainnya akan disiapkan apabila terjadi kontijensi.

"Untuk menciptakan ketertiban, kita harus siap 'perang'," ujar Kapolres sembari menjelaskan kata 'perang' dalam arti menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Purbalingga.

Karenanya, Kapolres menekankan tidak ada unsur apapun yang boleh mengganggu keamanan, kedamaian dan kondusifitas wilayah Purbalingga. Terutama

saat pelaksanaan Pilkada 2024. Siapapun yang berniat mengganggu ketertiban dan kondusifitas wilayah saat Pilkada, Polres Purbalingga akan menindak tegas.

"Semua anggota, saya ingatkan, tetap mempedomani aturan yang ada. Jangan terlibat politik praktis dalam Pilkada. Personel agar fokus dalam bertugas mengamankan Pilkada agar berjalan dengan aman dan lancar," tegasnya. **(Rus)-f**

Ruwatan Cara Buang Sial Masyarakat Adat Jawa

KARANGANYAR (KR)

- Sebanyak 23 anak mengikuti ruwatan massal secara adat Jawa di halaman pendopo Raden Mas Said Kabupaten Karanganyar, Senin (18/11). Anak-anak itu diharapkan terbebas dari petaka usai upacara buang sial. Ruwatan membutuhkan sejumlah sesaji. Seperti kain mori putih, bunga setaman, makanan jajan pasar, serta alat dapur lengkap. Ruwatan dipimpin ki Dalang Purbo Asmoro yang memulainya dengan pagelaran wayang kulit lakon Sudamala.

Pentas wayang kulit berdurasi 1,5 jam itu menceritakan Batara Guru yang mengutus Batara Narada, Batara Brahma, dan Batara Wisnu untuk mencegah Batara Kala berbuat onar di dunia saat mencari anak sukurto atau anak pertanda sial.

Ketiganya menyamar menjadi Dalang Kandabuwono, pemain kendang, dan tukang gender, serta dilengkapi dengan bacaan mantra untuk mencegah kekacauan. Setelah berha-

sil mengusir Batara Kala, para dewa tersebut bertemu Batara Bayu yang ditugaskan untuk membawa mereka kembali ke Kahyangan Swargaloka.

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan ruwatan massal bagian dari warisan budaya nenek moyang. Kebetulan memperingati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar

ke-107, tradisi buang sial itu dimunculkan lagi. Budaya itu sangat berbeda dengan agama yang dianut masyarakat saat ini, sehingga jangan diperdebatkan.

"Ruwatan sudah mulai punah. Ini bagian dari sarana berbudaya dan merawat tradisi," katanya.

Prosesi dilanjutkan pemotongan rambut kepala

oleh ki Purbo Asmoro. Satu per satu anak ruwat menghampiri ki dalang, mengantre dipotong rambutnya. 23 anak itu dari 11 keluarga. Puluhan anak penyandang sukurta atau kesialan itu diantaranya Ontang-Anting (anak tunggal laki-laki), Unting-unting (anak tunggal perempuan), Uger-uger lawang (dua anak seluruh-

nya laki-laki), Kembang sepasang (dua anak seluruhnya perempuan), Cukil Dhulit (tiga anak seluruhnya lelaki).

Gotong Mayit (tiga anak seluruhnya perempuan), Julung sungsang (anak yang lahir pada saat tengah hari) dan sebagainya.

Prosesi kemudian dilakukan pelepasan burung merpati oleh para orangtua anak ruwat. Prosesi terakhir memecahkan kendi berisi air bunga. Dalamnya juga ada beberapa keping uang koin. Uang inilah kemudian direbutkan. Dipercaya, menyimpan uang koin ruwatan membawa rezeki bagi pemiliknya. Annisa, warga Palur Karanganyar mengatakan dua anaknya diruwat. Satu anak lelaki dan satu anak perempuan-nya digolongkan kendhanya-kendhini.

"Mengikuti tradisi saja. Kalau ruwatan mandiri enggak mampu. Kebetulan difasilitasi pemerintah. Harapannya masa depan anak cerah dan terbebas dari kesialan," katanya. **(Lim)-f**



KR-Abdul Alim
Ki Purbo Asmoro memotong rambut anak ruwat.